

Kajian Filosofis: Pancasila dan Altruisme

Anggit Rizkianto

STID Al-Hadid Surabaya, Indonesia

Email: anggitrizkianto@gmail.com

Abstrak

Perilaku prososial (*prosocial behavior*) masyarakat Indonesia, khususnya perilaku altruisme, seringkali tidak terhubung dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila semakin tidak membumi di lapangan sosial. Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa Pancasila sebagai falsafah kenegaraan dan altruisme sebagai dasar tindakan moral pada dasarnya memiliki kedekatan gagasan dan dapat saling menopang. Studi ini merupakan studi teks, dengan menempatkan teks-teks relevan sebagai dokumen historis, lalu mendeskripsikannya kembali dan merekonstruksinya untuk menjawab masalah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari pandangan bahwa Indonesia sebagai suatu negara memiliki identitas kebangsaan yang kuat, yang sangat mengedepankan nilai gotong royong dan kebaikan bersama. Sementara itu, altruisme adalah sikap dan tindakan suka rela menolong orang lain. Seorang altruis selalu memiliki kesadaran moral mementingkan manusia lain dan kebaikan bersama, alih-alih diri sendiri. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam pengembangan kesadaran moral dan tindakan altruistik. Pancasila dapat semakin memperkokoh moral altruis tersebut dan membuatnya dapat semakin berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Filsafat Pancasila, Altruisme

Abstract

The prosocial behaviour of Indonesian people, especially altruistic behavior, often unrelated to the values of Pancasila. So, this means that Pancasila can not be realized in the social reality. The purpose of this article is to show that Pancasila as a state philosophy and altruism as a basis for moral action have similar ideas and can support each other. This study is a text study, with relevant texts as historical documents, then re-describing and reconstructing them to answer the problem. The result of the study show that Pancasila was born from the thought that Indonesia as a country has a strong national identity, which prioritizes the values of mutual cooperation and the mutual benefits. Meanwhile, altruism is the attitude and behavior of voluntarily helping others. An altruist always has a moral awareness of prioritizing other humans and mutual benefits, rather than themselves. As a national philosophy, Pancasila can be a solid foundation for developing moral awareness and altruistic behavior. Pancasila can also reinforce altruist moral and make it more sustainable in the life of Indonesian society.

Keywords: Pancasila, Pancasila Philosophy, Altruism



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai falsafah negara, Pancasila semestinya tidak hanya jadi simbol dan identitas bangsa Indonesia, tetapi juga terdapat pendalaman pemahaman, penghormatan, dan pengamalan terhadapnya. Kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diamalkan secara konsekuen dan konsisten di segala lini kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagaimana pandangan hidup dan ideologi pada umumnya, agar ia efektif memengaruhi kehidupan masyarakat, maka ia tak hanya diindoktrinasikan dalam upacara atau acara-acara seremonial lainnya, tetapi juga harus ada pengakaran atau radikalisisasi.¹ Proses radikalisisasi ini harus diarahkan agar Pancasila mempunyai kepercayaan diri serta daya juang, secara konsistensi tercermin dalam produk perundang-undangan dan

¹ Istilah radikalisisasi ini meminjam Kuntowijoyo (2001).

berkorespondensi dengan realitas sosial (Latif, 2020). Belakangan, Pancasila mendapatkan tantangan yang tidak mudah di tengah era globalisasi yang tak dapat dihindari. Tatanan dunia global yang terus berubah memengaruhi kohesifitas dan integrasi bangsa Indonesia. Dalam lanskap politik dunia, nilai-nilai keindonesiaan harus mengalami tarik-menarik dengan tatanan nilai yang berseberangan dengan falsafah Pancasila (Silitonga, 2020). Tantangan terhadap Pancasila berasal dari segala sisi, mulai dari arus kapitalisme pasar bebas dan demokratisasi tanpa batas; sampai kecenderungan eksklusi sosial yang mewujud dalam bentuk kekerasan berbasiskan fundamentalisme dan radikalisme agama, sekterianisme, premanisme dan tribalisme (Latif, 2020).

Sejak reformasi, radikalisme agama di Indonesia memang memiliki bentuk khusus. Ideologi gerakan-gerakan radikal tidak diperjuangkan secara demokrasi dan melalui jalur-jalur konstitusional, tetapi lebih banyak melalui "politik jalanan". Demonstrasi dan berbagai aksi yang dilakukan tak jarang diwarnai aksi kekerasan dan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Harus diakui bahwa sejak pasca orde baru, kelompok-kelompok radikal jadi tumbuh subur dan beberapa di antaranya mempunyai koneksi dengan jaringan Islam transnasional (Soetomo, 2016). Faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya gerakan radikal tersebut memang cukup beragam, selain karena faktor paham keagamaan, faktor lain seperti faktor ekonomi, faktor politik dan faktor psikologi juga turut menjadi sebab (Arifudin & Faridah, 2021). Sementara itu, kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi juga masih terus menyeruak di banyak lapisan masyarakat. Hampir tidak ada kalangan masyarakat Indonesia yang imun dari tindakan intoleransi, termasuk kalangan muda seperti mahasiswa sekalipun (Lestari, 2021).

Namun, menariknya, di saat yang sama berbagai perilaku prososial (*prosocial behaviour*) juga berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Kepedulian sosial dan tolong menolong terhadap sesama nyatanya masih menjadi tradisi dan perilaku kolektif yang mengakar kuat. Banyaknya musibah yang menimpa Indonesia, seperti gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, termasuk pula kecelakaan transportasi yang memakan banyak korban, tidak hanya melahirkan cerita kesedihan, tetapi juga kisah kebaikan penuh kasih dan tanpa pamrih. Altruisme—sebagai salah satu bentuk perilaku prososial—hadir dalam berbagai bentuk pertolongan dan kebaikan, baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Hal ini menunjukkan secara nyata bahwa bangsa Indonesia memang memiliki karakter dan jiwa penolong terhadap sesama (Hadori, 2014). Pandemi Covid-19 yang pertama kali merebak pada tahun 2020 semakin memantik tindakan-tindakan altruis masyarakat Indonesia. Tanpa adanya komando atau instruksi, masyarakat—baik individu maupun kelompok atau komunitas—dengan sukarela memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, baik finansial, barang kebutuhan pokok, bantuan medis, sampai bantuan yang sifatnya imateriel. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia punya modal sosial yang kuat untuk berperilaku altruistik. Hal tersebut juga semakin diperkuat dengan karakteristik masyarakat yang religius (Markum, 2020). Kemudian, di tengah kondisi pandemi yang menjelma ancaman krisis sosial ekonomi, tindakan altruis tersebut telah melampaui sikap filantropi secara elegan. Ia juga telah melampaui sikap karitatif yang acapkali mengandung harapan akan imbalan atau balas budi (Nugraha, 2020).

Namun, sayangnya, tindakan altruis kebanyakan masyarakat Indonesia itu tidak dilandasi oleh falsafah kebangsaannya. Perilaku kebaikan tanpa pamrih tersebut tidak terhubung dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi *leitstar* atau bintang penuntun. Dalam situasi pandemi Covid-19, perilaku altruisme masyarakat tidak bisa dilepaskan dari rasa empati. Artinya, aspek emosional adalah hal yang memainkan peranan penting di balik tindakan altruisme tersebut. Masyarakat Indonesia berbuat baik dan menolong sesama karena didorong

oleh perasaan senang jika dapat membantu; turut merasa sedih membayangkan mereka yang sedang dalam keadaan sulit selama pandemi; senang jika dapat menanamkan rasa optimisme; dan perasaan sejenis lainnya (Masitoh; Fitriyana, 2021). Tindakan altruisme juga didorong oleh adanya kesamaan-kesamaan pengalaman hidup (Rifda; Dewi, 2023). Lebih dari itu, altruisme masyarakat Indonesia sebagai wujud empati sosial juga dibentuk oleh adanya kesamaan identitas personal, misalnya kesamaan ras, etnis maupun asal daerah (Sauri, 2022). Pada akhirnya, berbuat baik, tolong menolong, dan kepedulian sosial hanyalah menjadi tindakan dan moralitas yang berdimensi psikologis atau sosiologis. Ia sama sekali tidak bersangkut paut dengan pemikiran dan keyakinan yang berdimensi ideologis. Di satu sisi barangkali ia tidak begitu menjadi masalah, karena ia tetap dapat meningkatkan kohesifitas masyarakat. Akan tetapi, di sisi yang lain, hal ini akan membuat falsafah bangsa Indonesia semakin terdorong jauh dari kenyataan sosial. Pancasila semakin tidak membumi. Tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa Pancasila sebagai suatu falsafah dan altruisme sebagai suatu konsep moral memiliki kedekatan bahkan kesamaan gagasan dan sangat mungkin keduanya saling menopang. Dengan membongkar kedua gagasan tersebut secara filosofis, tulisan ini juga hendak menjelaskan sejauh mana falsafah Pancasila dapat menjadi basis pengembangan tindakan-tindakan altruisme di lapangan sosial. Melalui studi ini, maka diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat lebih terejawantahkan di kenyataan melalui perilaku-perilaku altruis dalam berbagai bentuk.

METODE PENELITIAN

Studi ini adalah studi teks. Meminjam terminologi yang diungkapkan oleh Rorty, Cheneewind, dan Skinner (1984), studi teks adalah sebuah upaya rekonstruksi secara rasional dan historis. Artinya, dalam konteks studi ini, ide-ide yang berkaitan dengan Pancasila dan altruisme akan dianggap sebagai gagasan di dalam sejarah. Lalu, teks-teks yang berkaitan dengan Pancasila dan altruisme tersebut akan dianggap sebagai dokumen historis. Dokumen yang berkaitan dengan Pancasila diambil dari teks-teks yang secara historis berasal dari penggagas, perumus maupun penafsir Pancasila yang dianggap otoritatif. Begitupun dengan dokumen yang berkaitan dengan gagasan altruisme. Maka, yang dilakukan oleh penulis selanjutnya adalah menyajikan dan medeskripsikan kembali gagasan terkait Pancasila dan altruisme tersebut, lalu merekonstruksinya untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam studi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Nilai Pancasila

Pancasila pada dasarnya adalah fundamen, filosofi, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, yang kemudian dibangun di atasnya suatu negara Indonesia merdeka (Sukarno, 1964: 9). Sejak pertama dirumuskan pada 1 Juni 1945, Pancasila diharapkan dapat menjadi *guidelines* dalam upaya memerdekakan Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dimaksudkan sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia yang multikultural. Lebih jauh, Pancasila juga ditempatkan sebagai *philosophisce gronslag* atau pandangan hidup sehari-hari bagi bangsa Indonesia (Brata; Wartha, 2017). Dengan karakteristiknya yang multidimensi, maka Pancasila sejatinya bukan hanya dasar (flasafah) negara, tetapi juga ideologi nasional, pandangan hidup, serta *ligature* atau pemersatu dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dalam upaya mengarahkan dan mencapai tujuan bangsa Indonesia merdeka, Pancasila merupakan dasar statis yang dapat mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang bersifat dinamis. Dengan kedudukannya yang demikian, maka Pancasila adalah sumber kepribadian, jati diri, moralitas dan haluan keselamatan bangsa Indonesia (Latif, 2012: 41).

Namun, di sisi lain Sukarno juga menyatakan bahwa selain sebagai falsafah dasar negara, Pancasila juga merupakan *weltanschauung*, yang secara kebahasaan berasal dari bahasa Jerman yang berarti "pandangan dunia". Masalahnya, Sukarno sendiri tidak pernah memberi definisi terhadap *weltanschauung* yang dimaksudkannya. Ia hanya memberikan contoh-contohnya, misalnya seperti Hitler yang mendirikan Jermania di atas *national-sozialistische weltanschauung* atau Lenin yang mendirikan negara Sovyet di atas *marxistische, historisch materialistische weltanschauung* (Sukarno, 1964: 16-17). Nikolaus Driyarkara kemudian menekankan bahwa Pancasila harus ditekankan aspek kemanusiaannya alih-alih aspek keagamaannya yang dapat menyerupai ideologi. Pancasila harus dipahami sebagai suatu perspektif tentang kodrat dan keutuhan integritas kemanusiaan, yang kemudian kodrat itu mengerucut pada lima prinsip sebagaimana yang ada pada kelima sila Pancasila. Kelima sila itu saling kait-mengait, saling berhubungan, dan berada dalam satu kesatuan yang utuh (Driyarkara, 2006).

Lebih lanjut, kelima sila yang terdapat dalam Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat. Isi dari masing-masing sila Pancasila adalah suatu kesatuan. Kelima sila tersebut masing-masingnya memuat suatu asas peradaban yang membentuk dasar filsafat kenegaraan. Namun, masing-masing sila tersebut tetap memiliki suatu keutuhan dan kesatuan. Artinya, setiap sila tersebut adalah bagian (mutlak) dari Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila sejatinya adalah suatu kesatuan yang majemuk-tunggal. Maka, setiap sila Pancasila tidak dapat terlepas dari sila lainnya; tidak dapat berdiri sendiri-sendiri (Kaelan, 1996). Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak hanya menyangkut isi dari masing-masing sila, tetapi juga dasar ontologis dari masing-masing sila tersebut. Setiap sila Pancasila bukan asas yang berdiri sendiri, melainkan punya satu kesatuan dasar ontologis. Adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak monopluralis yang pada dasarnya adalah dasar ontologis Pancasila. Artinya, manusia adalah subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia (Notonagoro, 1975: 23).

Penempatan Pancasila sebagai filsafat juga dapat ditemukan dalam pandangan Moh. Hatta. Pancasila diyakini memiliki dua fondasi, yakni fondasi moral dan fondasi politik. Fondasi moral Pancasila adalah sila Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan fondasi politiknya adalah sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan (demokrasi), dan sila keadilan sosial. Dengan adanya fondasi moral, maka diharapkan negara punya dasar yang kokoh, yang dapat mengarahkan pada kebaikan, kejujuran, kebenaran, keadilan serta persaudaraan baik ke dalam maupun ke luar. Dengan politik pemerintahan yang punya dasar atau fondasi moral yang kuat, maka diharapkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai (Hatta, 1966: 30-31). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah falsafah bangsa dan negara Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat universal. Keuniversalan nilai-nilai Pancasila sangat penting karena ia berperan sebagai pemersatu dan jalan tengah bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah norma umum yang dapat diterima oleh semua elemen bangsa Indonesia hingga akhirnya Pancasila dapat menjadi konsensus bersama. Perlu juga ditekankan bahwa dasar ontologis Pancasila adalah aspek kemanusiaannya. Pancasila lahir dari gagasan akal budi manusia-manusia Indonesia, ditujukan sebagai pedoman hidup manusia-manusia Indonesia, dan diharapkan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia-manusia Indonesia pula. Sebagai suatu gagasan, Pancasila memang bersifat imanen dan profan.

Konsep Dasar Altruisme

Altruisme adalah satu bentuk perilaku prososial (*prosocial behavior*). Dengan kata lain, perilaku prososial adalah kategori perilaku menolong orang lain yang lebih luas dari altruisme. Banyak perbuatan menolong orang lain yang tidak bisa disebut tindakan altruistik, termasuk tindakan menolong yang didorong oleh pamrih, hubungan kekerabatan, merasa berkewajiban, atau rasa suka kepada orang yang ditolong (Taylor; Peptau; & Sears, 2009: 457). Hal paling mendasar dari altruisme adalah bahwa tindakan menolong tersebut dilakukan dengan tulus dan tidak berharap pamrih dalam bentuk apapun. August Comte pada abad ke-19 adalah yang pertama kali memperkenalkan istilah altruisme. Altruisme berasal dari bahasa Yunani, "*alteri*" yang artinya orang lain. Comte menggunakan kata *alteri* untuk memberikan penjelasan bahwa setiap manusia pada dasarnya mempunyai tanggung jawab moral untuk melayani umat manusia secara umum. Oleh sebab itu, setiap manusia hendaknya memiliki kepedulian lebih kepada orang lain alih-alih kepada dirinya sendiri (Hadori, 2014). Namun demikian, adalah sosiolog Pitirim Sorokin yang menyuarakan pentingnya mengkaji tentang altruisme. Sorokin mendefinisikan altruisme sebagai tindakan memelihara kebaikan pada fisik dan psikologi orang lain, yang dibentuk oleh cinta dan empati. Bagi Sorokin, tindakan altruis pada titik tertentu memerlukan pengorbanan diri demi orang lain (Sorokin, 1948: 60).

Altruisme juga dapat dibawa ke ranah konsep perilaku etis. Filsuf Peter Singer memiliki pandangan bahwa tindakan menolong orang lain bahkan hingga bersedia mengorbankan kepentingan diri sendiri memang lahir dari dorongan altruistik yang berasal dari internal manusia. Dorongan tersebut adalah tendensi bawaan setiap manusia sejak lahir, dan hal itulah yang jadi cikal bakal munculnya perilaku etis (Singer, 1981: 28). Bagi Singer, etika dalam manusia tidak bisa dilepaskan dari keadaan alamiahnya. Perilaku etis dibentuk oleh kondisi-kondisi biologis, sehingga ia menjadi bentuk paling primordial dalam perilaku biologis manusia itu sendiri. Kemampuan manusia berpikir rasional dan etis adalah yang terbentuk kemudian. Menurut Singer, bertindak rasional dan etis pada prinsipnya adalah bertindak berdasarkan prinsip moral yang sifatnya universal (Jena, 2018). Sementara itu, tindakan altruis juga diyakini dapat dikembangkan pada setiap orang karena adanya empati dalam diri manusia, dan itu juga dianggap universal. Empati adalah sikap yang selalu inheren dalam setiap diri manusia. Keberadaannya selalu tidak membutuhkan syarat (Batson; Dyck; Brandt; Batson; & Powell, 1988).

Sebagai bagian dari perilaku prososial, altruisme memang merupakan tindakan yang memberi manfaat pada orang lain, tapi tidak tertuju pada kepentingan perorangan (Crisp & Turner, 2007: 231). Tindakan sukarela dalam membantu orang lain dalam altruisme lepas dari adanya harapan akan imbalas, sehingga ia selalu disebut sebagai perilaku tulus tanpa pamrih. Dengan kata lain, altruisme adalah berbuat baik pada orang lain tanpa adanya antisipasi akan penghargaan dari orang yang diperlakukan baik tersebut (Taylor; Peptau; & Sears, 2009: 457). Oleh karena itulah, selalu ada *positive feeling* yang didapat oleh siapapun yang bertindak altruis (Carr, 2004). Dalam perspektif keagamaan, Morris dan Webb menekankan bahwa setiap agama mendorong pemeluknya agar senantiasa bertindak altruis. Keduanya juga menyatakan bahwa perilaku altruistik seperti halnya perbuatan mengasihi yang dalam bahasa Yunani dikenal dengan sebutan *agape*. Pada dasarnya *agape* merupakan perbuatan mengasihi orang lain yang dilakukan semata-mata demi kebaikan orang lain tersebut, tanpa sedikit pun dipengaruhi kepentingan dari subjek yang mengasihi (Morris & Webb, 1991).

Dalam memahami syarat-syarat suatu tindakan dikatakan altruistik, Monroe (1996) menguraikannya lebih jauh. Menurutnya, altruisme adalah suatu perilaku yang dimaksudkan untuk memberi maslahat bagi orang lain, bahkan ketika hal tersebut berisiko meminta pengorbanan atau berisiko terhadap kesejahteraan subjek atau pelaku altruis. Dengan berpijak

pada defisini ini, Monroe kemudian merumuskan syarat-syarat suatu perilaku disebut altruisme (Monroe, 1996). Pertama, altruisme harus berupa tindakan nyata. Artinya, ia tidak bisa hanya berupa pikiran dan niatan kepada orang lain. Kedua, tindakan nyata tersebut haruslah diarahkan pada tujuan walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara reflek. Ketiga, tujuan dari tindakan tersebut haruslah terutama untuk kemaslahatan orang lain. Artinya, jika kemaslahatan hanyalah konsekuensi dari tindakan, maka tindakan tersebut tidak bisa disebut altruisme. Keempat, niat akan tindakan lebih utama daripada konsekuensinya. Jadi, misalnya saja seseorang menyedekahkan sejumlah uang kepada orang lain untuk membuka suatu bisnis. Namun, di kemudian hari orang tersebut merasa dirinya tidak berbakat berbisnis dan memutuskan berhenti jadi pebisnis. Maka, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai altruistik seseorang yang bersedekah. Keenam, altruisme adalah kebaikan tanpa merah. Maka, yang jadi tujuan adalah kemaslahatan orang lain, sehingga tidak terdapat timbal balik di dalamnya.

Uniknya, tindakan altruisme pada titik tertentu juga dapat menjadi fondasi solidaritas. Monroe juga menekankan bahwa meskipun altruisme sangat bersifat individual-singular, namun nyatanya ia tak dapat dilepaskan dari universalitas humanitas. Betapapun motif di balik tindakan altruisme itu bersifat misterius, namun tindakan altruis itu bisa terjadi dalam kebersamaan. Dalam momen historis politik tertentu, tak jarang momen altruistik bertransformasi menjadi momen solidaritas ketika magnitudonya meningkat tajam (Robet, 2013). Lebih dari itu, altruisme juga dapat menjadi fondasi kebijakan negara. Adalah Richard Titmuss yang menekankan bahwa altruisme punya posisi fundamental dalam kebijakan sosial suatu negara. Bagi Titmuss, pasar dan komersialisasi tidak boleh dalam posisi yang menentukan untuk hal-hal subtil di mana martabat dan kehidupan manusia dipertaruhkan (Titmuss, 1997). Karena itulah, relasi antara sesama manusia di dalam kesukarelaan sudah selayaknya diinstitutionalisasikan di dalam kebijakan negara.

Relasi Pancasila dan Altruisme

Pancasila bukan hanya ideologi nasional, tetapi ia juga pandangan hidup (*world view*) bangsa Indonesia. Bahkan, posisi Pancasila sebagai pandangan hidup ini jauh lebih dulu sebelum Pancasila dikonstruksi sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila sejatinya adalah basis-struktur bangsa Indonesia karena ia merupakan pandangan hidup kultural manusia-manusia Indonesia. Bung Karno berpandangan bahwa Pancasila merupakan *hogere optrekking* (pengangkatan lebih tinggi) terhadap filsafat nusantara. Maksudnya, jauh sebelum Indonesia lahir dan gagasan Pancasila terbentuk, secara kultural nilai-nilai Pancasila telah lama hidup dan mengendap dalam khasanah kebudayaan nusantara. Nilai-nilai kultural inilah yang kemudian dilembagakan; diangkat ke dalam struktur sosial-politik bangsa berupa negara. Penempatan Pancasila dalam ranah kultur dan struktur negara inilah yang membuat Pancasila akhirnya menjelma jadi acuan ideologi bangsa. Artinya, segala praktik kebangsaan oleh manusia-manusia Indonesia haruslah berwawasan Pancasila (Sutrisno, 2016: 131). Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah cara bagaimana manusia-manusia Indonesia memandang dan menafsir dunia (Arif, 2018: 12). Maka, sudah selayaknya nilai-nilai Pancasila berada dalam dunia sehari-hari manusia Indonesia, dan menjadi pedoman dalam memaknai kehidupan, serta menentukan arah bangsa Indonesia di masa depan.

Dalam demikian, maka dapat dipahami bahwa secara filosofis nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi pandangan yang sama dengan gagasan altruisme. Keduanya pada dasarnya memiliki gagasan dalam wilayah etika dan kesadaran moral. Dalam alam pemikiran Pancasila, adanya suatu pandangan moral bersama/kolektif sangatlah penting untuk mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai *leitstar* atau bintang penuntun pada dasarnya adalah hendak

menempatkan Pancasila sebagai acuan dalam pembentukan kepribadian, jati diri, dan moralitas kolektif bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila adalah nilai-nilai etis universal yang telah menjadi kontrak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut tentu sangat diharapkan agar dapat teraktualisasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga keselamatan dan kemaslahatan bangsa Indonesia dapat terapai. Prinsipnya yang sama tentu dapat ditemukan dalam altruisme. Sebagai bagian dari perilaku prososial (*prosocial behaviour*), altruisme sangat menekankan konsep basis etik di balik suatu tindakan moral. Tindakan altruisme juga ditempatkan sedemikian rupa sebagai gagasan etika universal yang terhubung langsung dengan keadaan-keadaan manusia secara universal pula. Lebih jauh, altruisme juga dianggap mampu memantik solidaritas publik dan jadi dasar perumusan kebijakan publik sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pada akhirnya, sebagai gagasan yang sama-sama memiliki ciri universal, normatif, dan memiliki peran penting dalam pengembangan suatu masyarakat, Pancasila dan altruisme dapat dibaca relasinya tidak hanya pada wilayah tindakan-tindakan konkret di lapangan empirik, tetapi juga di wilayah yang sifatnya filosofis. Uraian lebih jelasnya sebagai berikut:

Pokok Gagasan: Dari Manusia dan Untuk Manusia.

Sebagai suatu kesatuan sistem filsafat, Pancasila tidak hanya terdiri dari sila-sila yang semuanya saling berkaitan satu sama lain, tetapi di dalamnya juga terdapat satu dasar ontologis. Kelima sila dalam Pancasila itu bukanlah asas-asas yang berdiri sendiri, tetapi mempunyai satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis tersebut tak lain adalah manusia yang pada dasarnya mempunyai hakikat mutlak monopluralis (Kaelan, 1996). Maksudnya, manusia adalah subjek pendukung pokok sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Artinya, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia (Notonagoro, 1975). Secara epistemologis, Pancasila tentu tak dapat dilepaskan dari dasar ontologisnya. Sebagai suatu ideologi, dapat dipahami bahwa Pancasila bersumber dari filsafatnya/ filsafat Pancasila. Maka, dapat dipahami pula bahwa dasar epistemologis Pancasila tak dapat dilepaskan dari hakikat manusia itu sendiri. Dengan kata lain, seturut dengan anggapan bahwa manusia adalah dasar ontologis Pancasila, maka hal itu berkonsekuensi pada bangunan epistemologinya, yakni bangunan epistemologi di dalam filsafat manusia (Kaelan, 1996).

Jika bicara epistemologi, maka pokok persoalannya adalah sumber pengetahuan dan susunan suatu pengetahuan. Sebagaimana telah disinggung, sumber pengetahuan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bukan bangsa lain. Bukan pula berasal dari pemikiran seseorang. Itu berarti gagasan Pancasila bersumber dari khazanah manusia-manusia Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Bung Karno, nilai-nilai Pancasila telah lama hidup secara kultural di tengah-tengah masyarakat nusantara. Kemudian para pendiri bangsa menggalinya, dan mengkonstruksinya sebagai ideologi bangsa ketika negara Indonesia dibentuk. Maka, dapat dipahami bahwa manusia-manusia Indonesia adalah kausa materialis Pancasila. Dengan kata lain, bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan, adat istiadat, serta karakteristik religius yang khas, adalah sumber pengetahuan Pancasila. Kemudian, kebudayaan sendiri memang menjadi kata kunci tersendiri dalam konstruksi gagasan Pancasila. Bung Karno sendiri memiliki gagasan "Ketuhanan yang Berkebudayaan" ketika bicara tentang sila ketuhanan. Gagasan Bung Karno itu sendiri dapat dibaca dalam dua perspektif, yakni perspektif ketuhanan dan perspektif kebudayaan. Dalam kajian kebudayaan, yang dibicarakan Bung Karno pada dasarnya adalah kebudayaan dalam arti filosofis. Bung Karno bicara tentang filsafat kebudayaan, yang berarti hakikat kebudayaan sebelum dan selama kebudayaan tersebut

dipraktikkan manusia. Kebudayaan adalah upaya manusia dalam memanusiaawikan diri lewat pemanusiaan kehidupan (Arif, 2016). Tercerabutnya nilai kemanusiaan akan berdampak pada tercerabutnya pula suatu budaya atau kebudayaan itu sendiri.

Dalam alam pemikiran Pancasila, sila ketuhanan adalah fondasi, sila yang menyinari sila-sila yang selainnya. Namun, pengamalan sila ketuhanan tersebut haruslah melalui keempat sila lainnya. Kebertuhanan hendaklah ditempatkan dalam otosentrisitas kebudayaan yang dasarnya adalah kemanusiaan (Arif, 2016: 69). Sila kemanusiaan adalah pusat pengamalan sila ketuhanan tersebut, yang ujungnya adalah keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima Pancasila. Hal ini tentu sebagaimana pandangan Bung Hatta, yang menyatakan bahwa sila ketuhanan adalah fundamen moral dan sila kemanusiaan hingga sila keadilan sosial adalah fundamen politik. Artinya, kebermanusiaan bangsa Indonesia dalam berpancasila sangat berdimensi teologis. Kemanusiaan dalam gagasan Pancasila adalah nilai-nilai kemanusiaan universal yang sumbernya dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (Ruslan, 2015: 196). Kemanusiaan Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang esensinya adalah pengakuan terhadap harkat sekaligus martabat manusia dengan segala hak serta kewajibannya. Hal ini kemudian menuntun manusia-manusia Indonesia untuk berlaku adil terhadap sesama manusia, terhadap alam dan juga terhadap Tuhan. Konsep kemanusiaan Pancasila ini juga menegaskan setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk beradab yang punya keyakinan dan daya cipta, rasa dan karsa (Soejadi, 1999: 89). Dan atas dasar itu pula sila kemanusiaan Pancasila punya fungsi penting dalam upaya pencegahan agar nasionalisme bangsa Indonesia tidak berkembang jadi chauvinisme atau nasionalisme sempit dan ekstrim (Rizkiyanto, 2022).

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa Pancasila dan altruisme sebenarnya memiliki keyakinan yang sama atas manusia. Para penggagas Pancasila meyakini bahwa masyarakat Indonesia memiliki cara berpikir, kebijaksanaan, nilai, serta keyakinan yang terus-menerus diwariskan, dan itu akan membawa kebaikan bagi peradaban bangsa. Atas keyakinan itulah maka apa yang diwariskan itu digali dan dikonstruksi menjadi ideologi nasional. Pancasila dibentuk dari keyakinan akan potensi-potensi kebaikan manusia Indonesia sendiri. Keyakinan akan potensi kebaikan ini pulalah yang juga membentuk gagasan altruisme. Kebajikan yang dihasilkan dari altruisme adalah perilaku yang ada pada banyak kebudayaan dan hampir ada pada semua agama di dunia. Sebagai antitesis dari egoisme yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan pribadi, altruisme punya keyakinan dan sikap optimis bahwa kebaikan dapat dilakukan dengan memusatkan motivasi pada semata-mata demi membantu orang lain atau keinginan melakukan kebaikan tanpa dipengaruhi adanya ganjaran terhadap kebaikan tersebut. Oleh karena itulah para ahli terus tertarik mengkaji ide altruisme ini, terutama dalam kajian psikologi humanistik dan evolusioner (Prasetyo, 2013).

Sebagaimana Pancasila yang menempatkan kebaikan bersama—yang dalam istilah Bung Karno adalah kesejahteraan umum—sebagai suatu harapan atau cita-cita dari segala nilai kebaikan yang bersemayam di masyarakat, maka begitu pula yang ada dalam alam pemikiran altruisme. Dalam perspektif evolusioner yang menyatakan bahwa esensi dari kehidupan adalah melanjutkan keturunan, memang dikatakan bahwa tindakan altruistik menjadi lebih mudah dilakukan jika orang yang ditolong merupakan kerabat dekat atau orang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Namun, para pakar psikologi sosial juga telah menegaskan bahwa tindakan altruistik mampu melampaui hal tersebut. Artinya, tindakan altruistik mampu dikembangkan hingga ke luar lingkaran kekerabatan dan kekeluargaan, bahkan hingga ke orang yang tidak dikenal secara merata (Crisp & Turner, 2007: 232). Anggapan itu kemudian diperkuat dengan peran norma-norma sosial pada masyarakat Timur—termasuk Indonesia—dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat. Norma-norma sosial (*social norms*) nyatanya

juga memainkan peran dalam mendorong perilaku altruistik. Artinya, altruisme yang terbentuk pada masyarakat Timur hadir dalam bentuk tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Tanggung jawab sosial yang tertanam dalam tiap orang inilah yang kemudian membentuk perilaku altruistik pada masing-masing individu, karena individu tersebut menganggap dirinya bagian dari suatu komunitas sosial (Batson, Ahmad, & Stocks, 2004). Kondisi inilah yang akhirnya memperkuat kemanusiaan suatu bangsa sebagaimana amanat Pancasila. Pancasila maupun altruisme sama-sama berasal dari manusia dan untuk manusia.

Pancasila dan Altruisme sebagai Pembentuk Solidaritas dan Penguatan Kohesi Sosial

Bung Karno berpandangan bahwa semua sila-sila dalam Pancasila dapat diperas menjadi satu sila saja, yang menjadi inti gagasan, yakni gotong royong. "Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong, alangkah hebatnya negara gotong royong," kata Bung Karno (Soekarno, 1961). Yudi Latif kemudian mengelaborasi lebih jauh maksud gotong royong dalam Pancasila tersebut secara lebih mendalam, bahwa sila ketuhanan hendaklah berjiwa gotong royong (berlapang dada, berkebudayaan dan toleran); sila kemanusiaan yang bergotong royong (berkeadilan, tidak eksploitatif, dan tidak menjajah); sila persatuan haruslah yang mengembangkan persatuan di antara keragaman, bukan yang meniadakan perbedaan; sila kerakyatan yang mengembangkan musyawarah mufakat, bukan kerakyatan yang didikte oleh suara mayoritas; dan sila keadilan sosial yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi dengan semangat kekeluargaan, bukan yang berbasikan kapitalisme (Latif, 2012: 19-20).

Dalam gagasan Bung Karno, kebangsaan adalah prinsip utama dalam Pancasila, karena negara Indonesia yang hendak dibentuk adalah negara yang satu untuk semua. Bukan satu negara untuk satu, atau pula satu negara untuk satu kelompok. Bagi Bung Karno, kebangsaan adalah nilai persatuan nasional, dan dengan itu masyarakat Indonesia bersatu membentuk negara karena mengalami kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah. Dengan kata lain, persatuan Indonesia tidak dibentuk oleh kesamaan agama ataupun bahasa, tetapi oleh persatuan itu sendiri (Arif, 2020). Jika agama ditempatkan sebagai dasar negara, tentu akan mendatangkan penolakan dari berbagai kelompok agama karena kenyataannya ada banyak agama di Indonesia. Untuk itulah persatuan atau nasionalisme menjadi penting. Keinginan kuat agar masyarakat Indonesia bersatu dalam suatu identitas kebangsaan merupakan modal utama dalam pembentukan negara yang merdeka seutuhnya (Rizkianto, 2021).

Namun, yang harus diingat adalah bahwa kebangsaan Indonesia tidaklah bersifat sekuler. Kebangsaan (nasionalisme) bangsa Indonesia nasionalisme religius. Itulah kenapa di dalam Pancasila sila ketuhanan pada akhirnya ditempatkan sebagai sila pertama. Prinsip ketuhanan dalam Pancasila tetaplah yang utama, ia menjadi fondasi bagi sila-sila yang lain. Dalam upaya mengembangkan kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, nilai-nilai ketuhanan harus menjadi landasannya. Akan tetapi, sebagaimana yang telah disinggung, ketuhanan dalam Pancasila adalah ketuhanan yang berkebudayaan; ketuhanan yang mengedepankan kemanusiaan dengan sikap hormat-menghormati. Atas dasar itulah, penting untuk dipahami bahwa nilai ketuhanan Pancasila bukan bersifat doktrinal dan sama sekali tidak mencerminkan konsep teologi agama tertentu. Nilai ketuhanan Pancasila lebih merupakan nilai universal yang terdapat di semua agama. Nilai universal itu lalu menaungi cita-cita utama Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat demokratis demi mencapai keadilan sosial (Arif, 2020). Dari titik inilah maka nilai ketuhanan Pancasila memainkan peran untuk merekatkan masyarakat Indonesia; mempersatukan kelompok-kelompok sosial bangsa Indonesia.

Nilai universal dalam sila ketuhanan Pancasila sebenarnya juga dapat kita temukan dalam gagasan Bung Hatta. Bung Hatta berkeyakinan bahwa sila ketuhanan memberikan mandat kepada manusia-manusia Indonesia, tidak hanya meyakini eksistensi Tuhan, tetapi juga berperilaku baik sebagaimana sifat-sifat Tuhan (yang bersifat universal), seperti misalnya berperilaku adil dan mengasihi-menyanyangi (Hatta, 1984). Pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa menuntun bangsa Indonesia untuk berharmoni dengan alam, serta menjalin persaudaraan kepada sesama manusia. Dengan bertuhan, maka manusia-manusia Indonesia harus senantiasa berperilaku baik, konsisten dan konsekuen dalam kebajikan sebagaimana yang diajarkan Tuhan, dan sebagaimana yang diajarkan oleh semua agama. Perihal kebajikan ini, Bung Hatta mengurainya dengan cukup panjang, misalnya: membela keadilan, menentang atau mencegah kezaliman, bersikap jujur, melawan kecurangan, menentang segala yang kotor, melenyapkan segala buruk (Hatta, 1984: 40).

Pada akhirnya, Pancasila adalah instrumen untuk menguatkan kohesi sosial dan membentuk solidaritas. Paham ketuhanan, kebangsaan dan kemanusiaan Pancasila memiliki karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia tidak bersifat agresif dan monolit, tetapi bersifat inklusif (Mun'im DZ, 2014). Artinya, nasionalisme Indonesia membiarkan agama yang berbeda-beda tetap hidup, budaya yang berbeda-beda tetap berkembang, dan bahasa yang berbeda-beda tetap lestari. Maka menjadi wajar kalau Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi salah satu falsafah kebangsaan Indonesia. Konsep kebhinekaan (keanekaan) sangat berbeda dengan konsep pluralisme yang banyak berkembang di bangsa-bangsa Barat. Pluralisme sangat identik dengan gagasan liberal, namun tidak dengan kebhinekaan yang dianut Indonesia. Kebhinekaan bangsa Indonesia bukanlah gagasan yang berdiri sendiri, karena ia diikat oleh gagasan persatuan atau kebangsaan itu sendiri. Pemikiran ini tentu sejalan dengan gagasan gotong royong sebagaimana digagas Bung Karno. Sebab, gotong royong adalah gagasan yang sangat dinamis, berbeda dengan kekeluargaan yang statis. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, dan perjuangan bantu-membantu bersama; semua amal dilakukan untuk kepentingan dan kebahagiaan bersama (Sukarno, 1964).

Altruisme pun sejatinya juga memiliki gagasan serupa, dalam arti sebagai potensinya untuk menguatkan kohesi sosial di masyarakat dan membangun solidaritas sosial. Sebagai prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan kemanusiaan dalam Pancasila yang bersifat universal, altruisme juga memiliki kekhasan universalisme nilai yang sama. Sebagai tindakan individual yang khas dan singular, altruisme tetap mengarah pada humanitas universalitas (Monroe, 1996). Memang sulit untuk melacak dan memastikan motivasi tiap-tiap individu dalam bertindak altruis. Pada dasarnya altruisme adalah kebajikan paling fundamental, populer dan sekaligus paling misterius (Palmer, 1919). Akan tetapi, terlepas bahwa motif tindakan altruisme masih menjadi misteri, sejarah telah membuktikan bahwa tindakan altruis dapat terjadi secara bersamaan. Bahkan, dalam momen politik historis tertentu, tak jarang ada orang-orang yang secara sengaja berjuang dan smendatangi bahaya, mengorbankan diri dengan segala risiko. Dengan kata lain, fakta empirik menunjukkan bahwa tindakan altruistik dapat muncul secara bersamaan tanpa perlu dicari-cari justifikasinya, karena tindakan tersebut muncul secara spontan dan tidak dicampuri *self-interest* tertentu (Robet, 2013).

Anggapan bahwa altruisme dapat menjadi alat solidaritas juga sejalan dengan pikiran filsuf Peter Singer sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa altruisme pada manusia mampu melampaui batas-batas biologisnya dan mencapai altruisme universal (Jena, 2018). Pada titik ini, altruisme dapat dikembangkan menjadi prinsip penggerak tindakan moral, dan menunjukkan kemampuan manusia dalam mengembangkan kebudayaan dan melampaui kepentingan individu yang sempit. Maka, sebagaimana Pancasila yang mampu menyatukan

manusia-manusia dengan pandangan hidup dan falsafah kebangsaannya, altruisme juga dapat melakukan hal serupa dengan prinsip etis-politisnya.

Falsafah Pancasila sebagai Basis Tindakan Altruis: Sebuah Kemungkinan

Menempatkan Pancasila sebagai falsafah kebangsaan, menuntun masyarakat Indonesia pada suatu keyakinan bahwa Pancasila adalah pedoman hidup, sekaligus juga landasan moral dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila mesti menjadi pedoman serta tuntunan, baik oleh rakyat Indonesia maupun pemerintah dan pemimpin-pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan. Hal ini sebagai pandangan Oetomo yang menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup (*world view*): Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas serta kehidupan di segala bidang. Ia juga berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menata kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah monodualistis, oleh karenanya dalam menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya senantiasa mengembangkannya sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial untuk mewujudkan kehidupan bersama menuju pandangan hidup berbangsa dan bernegara (Oesman, 1992).

Dengan demikian, Pancasila haruslah menjadi prinsip moral kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila lebih dari sekadar kontrak sosial yang memiliki kedekatan dengan prinsip-prinsip hukum. Artinya, meskipun anggapan bahwa Pancasila telah menjadi ideologi yang bersifat indoktriner tidak dapat dihindari, tetapi lebih dari itu Pancasila juga harus dipahami sebagai konsepsi politis yang mampu melampaui kesepakatan atau konsensus politik (*political agreement*), kontrak sosial, ataupun *common denominator*. Pancasila sebagai konsepsi yang bersifat politis itu memiliki pandangan yang berdiri sendiri, dan meskipun membentuk pandangan tentang negara, ia dibentuk secara independent oleh nilai-nilai yang bersifat non-politis (Wahyudi, 2006). Pancasila adalah rumpun dari nilai moral yang memperkuat dasar negara, dan tidak menyangkal nilai-nilai lain atau bahkan paham-paham lain yang berlaku pada orang per orang, keluarga, lembaga asosiasi masyarakat; juga tidak menyatakan bahwa Pancasila—secara politis—terpisah dari dari semua paham atau nilai yang ada di masyarakat (Wahyudi, 2006).

Lebih jauh, cara pandang tersebut akan membuat Pancasila hanya ditempatkan sebagai bangunan nilai (*values*), alih-alih sebagai norma hukum yang bersifat koersif atau memaksa. Negara atau pemerintah memang sudah seharusnya menempatkan Pancasila sebagai nilai, bukan sebagai norma yang pada gilirannya menjadi media penegakkan hukum, dan berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan yang justru kontradiktif dengan semangat Pancasila itu sendiri. Pada intinya, Pancasila semestinya cukup menjadi panduan hidup bagi setiap insan Indonesia, tidak perlu menjadi norma yang punya kekuatan memaksa, dan berpotensi disalahgunakan oleh lembaga kekuasaan (Fatayati & Mahardika, 2021). Pancasila yang ditempatkan sebagai prinsip nilai dan pandangan hidup itu tentu akan menguatkan posisi Pancasila sebagai sesuatu yang universal, sebagaimana gagasan altruisme. Sebagaimana altruisme, Pancasila semestinya dapat menjadi suatu gagasan moral dan etik yang dapat diterima secara luas karena sisi kenormatifannya dan tidak terikat pada suatu gagasan ideologis yang terlalu kaku. Hanya saja, dalam hal ini ada satu hal yang perlu dicatat; bahwa tidak sebagaimana Pancasila, altruisme masih menyimpan berbagai misteri terkait bagaimana tindakan altruistik itu sendiri. Artinya, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, betapapun motivasi seseorang bertindak altruis itu seringkali masih menjadi tanda tanya (Robet, 2013).

Atas dasar itulah, maka Pancasila sebagai suatu falsafah kebangsaan dapat mengisi kekosongan dasar tindakan dari altruisme tersebut. Maksudnya, sekalipun tindakan-tindakan altruis terus menyeruak di lapangan sosial, namun ia tetap perlu diperkuat dengan dasar kognisi dan pemikiran sebagai dasar moralnya. Bagaimanapun juga altruisme itu sendiri tetap perlu dikembangkan agar tindakan-tindakan kebajikan tersebut dapat terhubung dengan sistem dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan begitu, maka ideologi negara tidak hanya hidup dalam alam indoktrinasi, tetapi juga tersemayam dalam kehidupan secara empirik di masyarakat. Ini juga akan memperkuat fungsi Pancasila sebagai instrumen solidaritas dan kohesi sosial. Agaknya kemungkinan Pancasila menjadi basis tindakan altruistik tersebut adalah sesuatu yang sangat realistis. Pasalnya, nilai-nilai Pancasila secara ontologis maupun epistemologisnya sangat berkaitan dengan kemanusiaan; ia hakekatnya berbicara tentang manusia, dan berasal dari manusia. Pancasila adalah produk kemanusiaan dan kebudayaan manusia-manusia Indonesia. Oleh karenanya, apa yang diajarkan Pancasila sama sekali tidak menentang sifat alamiah altruisme. Sebagaimana argumen Peter Singer, misalnya, bahwa perbuatan menolong orang lain pada manusia didorong oleh kondisi altruistik dalam diri manusia yang memang sifatnya alamiah. Artinya, perilaku etis manusia pada dasarnya tidak lebih dari perilaku biologis dalam bentuknya yang paling primordial (Jena, 2018). Dengan demikian, Pancasila akan memainkan peran dalam wilayah kognitif, dengan cara menyemai nilai dan ajaran Pancasila itu secara sistematis, sehingga tindakan etis dan altruistik memiliki dasar pengetahuan dan keyakinan yang kuat. Maka, tindakan altruistik itu tidak hanya bersifat biologis, tapi ia juga diperkuat secara ideologis.

Gagasan ini tentu sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Dengan menempatkan Pancasila sebagai falsafah kebangsaan sekaligus sistem filsafat yang kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan altruistik, maka tentu altruisme itu sendiri akan mudah untuk dikembangkan dalam konteks keindonesiaan. Mengingat bahwa Pancasila adalah paham yang dinamis, maka dengan mendorongnya sebagai dasar moralitas, pada gilirannya akan membawa Pancasila menjadi sistem etika tersendiri bagi bangsa Indonesia. Artinya, lebih dari sekadar *way of life*, Pancasila juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk menjadi tuntunan masyarakat Indonesia dalam bersikap dan berperilaku. Sebagai *moral guidance*, maka perwujudan konkret nilai dan ajaran Pancasila adalah tindakan-tindakan altruis di lapangan riil. Dalam perspektif aliran etika, etika Pancasila memiliki kesamaan dengan etika keutamaan atau kebajikan, suatu paham etika yang mempelajari *virtue* (keutamaan) dan menaruh perhatian pada keberadaan manusia, dan menekankan pada konsep *what should I be?* (Nurwardani dkk, 2016). Tindakan altruis berbasiskan etika Pancasila ini tentu mengarah pada esensi ajaran dan apa yang dicita-citakan Pancasila itu sendiri. Itu berarti tindakan menolong manusia lain itu memiliki dimensi ketuhanan, dimensi humanisme atau kemanusiaan, dimensi persatuan, dimensi kerakyatan dan permusyawaratan, serta dimensi keadilan sosial. Pada puncaknya, segala moral altruis itu tidak lepas dari semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap identitas keindonesiaan.

KESIMPULAN

Pancasila adalah gagasan yang lahir dari alam kebudayaan dan kemanusiaan Indonesia. Sebagai falsafah bangsa, nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi sosiologis dan historis, ia digali oleh para pendiri bangsa dari pikiran-pikiran yang sudah lama hidup di bumi Indonesia. Atas dasar itu, maka dapat dipahami bahwa secara epistemologis Pancasila lahir dari manusia-manusia Indonesia dan ia ditujukan untuk kepentingan manusia-manusia Indonesia. Dimensi kemanusiaan inilah yang membuat Pancasila memiliki kedekatan konsep dengan altruisme, sebuah gagasan yang menggali sisi kemanusiaan secara mendalam; dan memiliki pandangan

bahwa tindakan baik (menolong orang lain) didorong oleh sisi altruistik manusia secara alami. Secara filosofis, Pancasila dan altruisme sama-sama berangkat dari pikiran-pikiran akan kebaikan manusia yang dipandang universal.

Falsafah Pancasila sangat mungkin untuk dijadikan sebagai basis pemikiran yang melandasi moral altruis bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dikandung Pancasila dapat mengisi kekosongan motivasi tindakan altruistik yang masih menyimpan misteri. Dengan kata lain, Pancasila, yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dapat mengisi aspek kognisi di balik tindakan menolong orang lain dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, bagi manusia-manusia Indonesia, tindakan altruistik yang dilakukan tidak hanya berdimensi psikologis, tetapi juga ideologis. Hal ini akan semakin memperkuat moral altruis tersebut dan membuatnya dapat semakin berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Studi ini menawarkan bahwa manusia-manusia Indonesia sebaiknya tidak hanya menjadi seorang nasionalistik, tetapi juga seorang altruistik. Dengan begitu, Pancasila semakin menemukan perwujudan konkretnya di lapangan riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barbasy, M.M., Cahyono, M., & Sulastri, E. (Ed.). (2014). *Radikalisasi Pancasila*. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.
- Arif, S. (2016). *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arif, S. (2020). Islam Dan Pancasila Pasca Reformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama. *Jurnal Tasshwirul Afkar*, 38(02), 193-212.
- Arifuddin & Faridah. (2021). Da'wah In Responding To The Problems Of Contemporary Radicalism. *Jurnal Diskursus Islam*, 9(1), 74-86.
- Batson, C.D., Dyck, J.L., Brandt, J.R., Batson, J.G., Powell, A.L. (1988). Five Studies Testing Two New Egoistic Alternatives to the Empathy-Altruism Hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 55(1), 52-77.
- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7 (1), 120-132.
- Crisp R.J., & Turner, R.N. (2007). *Essential Social Psychology*. London: Sage Publications.
- Driyarkara, N. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatayati, S., & Mahardika, A. G. (2021). Reposisi Pancasila dari Norm Menjadi Values sebagai Integrasi Pancasila dan Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(1), 1-16.
- Hadori, M. (2014). PERILAKU PROSOSIAL (PROSOCIAL BEHAVIOR); Telaah Konseptual Tentang Altruisme (Altruism) Dalam Perspektif Psikologi. *JURNAL LISAN AL-HAL*, 8(1), 1-13.
- Hatta, M. (1966). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hatta, M., dkk. (1984). *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Jena, Y. (2018). Altruisme Sebagai Dasar Tindakan Etis Menurut Peter Singer. *Respons*, 23(01), 58-82.
- Kaelan. (1996). Kesatuan Sila-Sila Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 42-52.
- Latif, Y. (2012). *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2020). *Reaktualisasi Pancasila*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

- Lestari, G. (2021). Radikalisme Atas Nama Agama dalam Perspektif Intelektual Muda di Tengah Realitas Multikultural. *Khazanah Theologia*, 3(3), 181-193.
- Markum, M.E. (2020, 26 Juni). Mempertahankan Perilaku Altruistik. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/06/26/mempertahankan-perilaku-altruistik>
- Masitoh, S., & Fitriyana, R. (2021). Potret Empati-Altruisme Masyarakat Urban Di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Temilnas IPS 2021*, 228-238.
- Monroe, K.R. (1996). *The Heart of Altruism: Perceptions of a Common Humanity*. Princeton: Princeton University Press.
- Morris, E.E., & Webb, E.J. (1991). Altruism and Philanthropy: Religious and Secular Approach. *Research Paper 1104*, Graduate School of Business, Stanford University.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Nugraha, A. (2020, 4 April). Pandemi Corona dan Memperkuat Altruisme Komunitas. *Sebijak Institute*. <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/04/04/pandemi-corona-dan-memperkuat-altruisme-komunitas/>
- Nurwardani, P., dkk. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti.
- Oesman, O. (1992). *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Palmer, G.H. (1919). *Altruism: Its Nature and Varieties; The Ely Lectures for 1917-1918*. New York: Charles Scribner's Son.
- Rifda, M.F., & Dewi, D.K. (2023). Gambaran Altruisme Pada Relawan Kesehatan Mental Berlatar Belakang Non-Psikologi. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(02), 705-716.
- Rizkiyanto, A. (2021). *Relasi Agama dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Rizkiyanto, A. (2022). Falsafah Pancasila sebagai Basis Pengembangan Dakwah Islam. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 69-94.
- Robet, R. (2013). Altruisme, Solidaritas, dan Kebijakan Sosial. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18(1), 1-18.
- Rorty, R., Cheneewind, J.B., & Skinner, Q. (1984). *Philosophy in History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ruslan, I. (2015). *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Suka Press.
- Sauri, S. (2022). Indonesian Altruism Thought Crowdfunding Platform at Kitabisa.com. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(1), 273-280.
- Silitonga, T.B. (2020). Tantangan Globalisasi, Peran Negara, Dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15-28.
- Singer, P. (1981). *The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology*. New York: New American Library.
- Soekarno. (1961). *"Lahirnya Pancasila" Dalam Tujuh Bahan Indoktrinasi*. Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung.
- Soetomo, G. (2016). Radikalisme Di Indonesia Sejarah Rekonstruksi Dan Dekonstruksi. *Indo-Islamika*, 6(1), 108-138.
- Sorokin, P. (1948). *The Reconstruction of Humanity*. Boston: Beacon Press.
- Sukarno. (1964). *Tjatkan Pantja Sila! Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Sutrisno, S. (2016). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Taylor, S.E., Peplau, L.E., & Sears, D. O. (2009). *Social Psychology. (12th Ed)*. Pearson Education-Prentice Hall. (Edisi Terjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Titmuss, R. (1997). *The Gift Relationship: from Human Blood to Social Policy*. New York: The New Press.
- Wahyudi, A. (2006). Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis?. *Jurnal Filsafat*, 39(1), 94-115.